



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

B1

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 20 November 2012 No. 93

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Drs. SOLIHIN
2. Jabatan : EXECUTIVE VICE PRESIDENT - LOGISTIC
3. NHK : 91777
4. Alamat Kantor : Jl. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 1, BANDUNG
5. Tanggal Pelaporan : 30 Juni 2009, 17 Juli 2012

II. DATA HARTA

**A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

1. Tanah & Bangunan seluas 90 m2 & 90 m2, di Kabupaten BANDUNG BARAT, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1998 sampai dengan 2000
2. Tanah & Bangunan seluas 93 m2 & 75 m2, di Kabupaten BANDUNG BARAT, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1995 sampai dengan 2000

Status Laporan

	30 Juni 2009		17 Juli 2012
	Rp. 393.850.000		Rp. 502.323.000
1.	Rp. 93.150.000		Rp. 93.150.000
2.	Rp. 83.655.000		Rp. 83.655.000

	30 Juni 2009	17 Juli 2012
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Perubahan Data Karena Penambahan/Pengurangan)	Rp. 328.672.384	Rp. 130.069.353
E. PIUTANG	Rp. 0	Rp. 0
TOTAL HARTA (II)	Rp. 1.067.922.384	Rp. 1.392.792.353
III. HUTANG	-----	Rp. 120.000.000
1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG (Penambahan Hutang baru)	-----	Rp. 120.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp. 1.067.922.384	Rp. 1.272.792.353

Jakarta, 16 Agustus 2012

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
DEPUTI

DIREKTORAT PENDAFTARAN
DAN PEMERIKSAAN LHKPN
PLH. DIREKTUR

TTD
ISWAN ELMI

TTD
ADLINSYAH M.N

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.